

## **Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon**

### ***Evaluation of the Performance Accountability Report of Government Agencies at the Tomohon City Regional Finance and Revenue Management Agency***

**Clivert Charis Londa<sup>1</sup>, Hendrik Manossoh, Sonny Pangerapan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia  
Email : [clivertcharis@gmail.com](mailto:clivertcharis@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak:** Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporan adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota. Produk akhir dari SAKIP ialah LAKIP, yang adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah optimal. Hasil Penelitian yang diperoleh lalu dilakukan analisis untuk mengetahui Laporan Kinerja yang terdapat dalam LAKIP BPKPD apakah sudah sesuai dengan format penyusunan LAKIP yang diatur dalam PerMENPAN dan RB 53 Tahun 2014.

**Kata kunci :** LAKIP, Akuntabilitas, Kinerja

**Abstract:** Government agencies that are obliged to implement a performance accountability system and reporting reporting are agencies from the Central Government, Regional Government, Regency/City. The final product of SAKIP is LAKIP, which is a Performance Accountability Report for Government Agencies. The Government Agency Performance Report (LAKIP) is deemed necessary to determine the agency's ability in the vision, mission, and goals of the organization, the benefits of LAKIP can be used as evaluation material for the relevant government agency for 1 fiscal year. This study aims to determine whether the Performance Accountability Report in the Tomohon City Financial and Regional Revenue Management Agency is optimal. The results of the research obtained were then analyzed to determine whether the Performance Report contained in the BPKPD LAKIP was in accordance with the format with the preparation of the LAKIP regulated in PerMENPAN and RB 53 of 2014.

**Keyword :** LAKIP, Accountability, Performance

#### **1. PENDAHULUAN**

Setiap instansi pemerintah selalu berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Terselenggaranya

pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan sistem manajemen kinerja dan pengendalian mutunya dengan baik maka wajib membuat LAKIP. Ini diperlukan dengan mengasumsikan bahwa jika sistem LAKIP berjalan dengan baik, maka akan dapat mewujudkan hasil yang baik. Instansi pemerintah sudah seharusnya selalu memperbaiki manajemen kerjanya agar dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya, walaupun belum diketahui sejauh mana keberhasilan instansi tersebut meraih output yang diharapkan. Karena peningkatan kinerja tidak bisa dipisahkan dari evaluasi atas sistem yang berjalan. Di sisi lain, tidaklah cukup hanya mengandalkan perbaikan sistem saja karena terdapat perbaikan beberapa sektor seperti perbaikan budaya organisasi, kepemimpinan, dan lain-lain yang juga harus diperhatikan. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah salah satu SKPD yang menerapkan LAKIP. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah dalam pelaksanaan strategi, serta visi dan misi instansi pemerintah sebagai pengindikasikan keberhasilan atau kegagalan dalam program yang diterapkan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon wajib untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kinerja yang dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Melalui beberapa uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon”**

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Akuntansi**

Kartikahadi, dkk (2016:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan, 2017:1).

### **2.2 Konsep Akuntansi Sektor Publik**

Dwi Ratmono (2015) Pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian 2010:3).

### **2.3 Konsep Akuntansi Pemerintahan**

Pada saat ini terdapat perhatian lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik untuk yang meningkatkan mutu pengawasannya maupun untuk menghasilkan informasi keuangan. Jasa akuntansi ini dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah suatu cabang akuntansi yang melengkapi disiplin ilmu akuntansi sebagai suatu keutuhan dan memisahkan berbagai karakteristik dengan akuntansi bisnis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, mencakup prinsip-prinsip dalam menyusun dan menyajikan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah daerah harus mempunyai sistem akuntansi yang handal untuk dapat mewujudkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Selain sistem akuntansi yang handal, dalam langkah pelaksanaan otonomi daerah desentralisasi fiskal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan daerah. Oleh sebab itu pada tahun 2005 telah dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pada tahun 2010 PP Nomor 24 Tahun 2005 diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

### **2.4 Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan *good governance*. Akuntabilitas memerlukan adanya hubungan hirarki yang jelas di antara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit di bawahnya. Hubungan hirarki ini biasanya telah ditetapkan dengan jelas baik dalam bentuk aturan organisasi yang disampaikan secara formal ataupun dalam bentuk jaringan hubungan informal. Prioritas pertanggungjawaban lebih diutamakan pada jenjang pimpinan atas dan diikuti terus ke bawah, dan pengawasan dilakukan secara intensif agar aparat tetap menuruti perintah yang diberikan.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/*agent*/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

### **2.5 Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan kinerja yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen LAKIP. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.

Penyusunan LAKIP harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat LAKIP merupakan media pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah, maka penyampaian LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik. LAKIP tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **2.6 Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Anriani, Rosita dan Ihsan (2015) dengan judul Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance pada Politeknik Negeri Padang. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa LAKIP Politeknik Negeri Padang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan di awal.
2. Yusrianti dan Safitri (2015) dengan judul Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintahan Kota Palembang. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tingkat pencapaian keseluruhan dari implementasi SAKIP SKPD sebagian besar tergolong kurang baik sehingga memerlukan bantuan dalam persiapan LAKIP.
3. Sofyani dan Akbar (2013) dengan judul Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan secara positif dan signifikan terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja.
4. Santoso (2013) dengan judul Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulut telah disajikan dengan cukup baik sesuai dengan permen PAN No.29 tahun 2010.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi Sugiyono (2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan evaluasi yang bertujuan membandingkan

kesesuaian antara tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan standar yang telah ditetapkan yaitu pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diatur dalam PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 dan mengukur kinerja apakah sudah optimal atau belum yang diukur menggunakan metode sturges.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Waktu penelitian dari bulan Mei 2021 sampai dengan selesai.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif berupa hasil wawancara dengan pimpinan dan staf di bidang perencanaan yang berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan dokumen yang berupa pedoman penyusunan LAKIP serta dokumen LAKIP tahun 2020 untuk memahami dan memperoleh data serta informasi lebih lanjut pada objek yang diteliti.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan staf perencanaan yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini data primer berupa struktur organisasi, visi dan misi organisasi sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari yang sudah ada dari kinerja tahunan serta data Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Observasi

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pihak terkait yang ada dalam instansi terkait yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

a) Vonny Sompotan, SE (Sekretaris BPKPD)

b) Eivy Ngantung, SH (sub Bagian Keuangan, Aset dan Pelaporan)

#### 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan-catatan atau laporan-laporan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan untuk analisis maupun sebagai penunjang proses penelitian.

### **3.5 Metode dan Proses Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui apakah format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dilakukan dengan cara membandingkan apakah sudah sesuai atau tidak dengan format penyusunan LAKIP menurut PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014. Selanjutnya dalam mengukur pencapaian kinerja berdasarkan LAKIP BPKPD apakah telah optimal atau tidak dilakukan dengan cara menggunakan metode STURGES yaitu:

1. menyusun nilai indeks tertinggi capaian program kinerja BAPPEDA sampai terendah berdasarkan Laporan Kinerja BAPPEDA.

2. Menyusun kelas capaian. Menyusun kelas capaian dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\Sigma K = 1 + 3,3 \log n$$

di mana:

$\Sigma K$  = banyak kelas

n = jumlah data

setelah jumlah kelas didapatkan kemudian tentukan kriteria penilaian untuk jumlah kelas yang didapatkan, kemudian cari interval/lebar kelas dengan cara : Interval/lebar

$$\text{kelas} = \frac{\text{range/rentang data}}{\text{Jumlah kelas}}$$

Selanjutnya menyusun tabel distribusi frekuensi kelas pencapaian dan mengklasifikasikan tiap-tiap kelas ke dalam kriteria penilaian. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi dimulai dengan menjumlahkan batas bawah masing-masing kelas dengan intervalnya dimulai dari kelas terendah sampai dengan kelas tertinggi untuk mengklasifikasikan angka indeks yang telah diperoleh ke dalam kategori kelas dan kriteria penilaian.

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan LAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.
2. Menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon tahun 2020
3. Langkah selanjutnya adalah Menganalisis LAKIP berdasarkan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Menarik Kesimpulan dan memberikan saran.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2020, yang terdiri dari 4 bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, tugas pokok dan fungsi, dasar hukum, aspek strategis, serta struktur organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja dan perencanaan anggaran tahun 2020.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja  
Pada bab ini disajikan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, realisasi anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah.
- Bab IV Penutup  
Pada bab ini diuraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon tahun 2020 dan cara kedepan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

##### **4.1.1 LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon 2020**

**4.1.1.1 Capaian Program dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon**

**Tabel 4.1 Capaian Program Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon**

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	- Tersedianya Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	100%	95,22%
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor - Tersedianya Peralatan Gedung Kantor - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	97,10%
<b>3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> - Pendidikan dan Peralatan Formal - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya Pendidikan dan Peralatan Formal - Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	71%
<b>4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Sementara - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD - Tersusunnya Pelaporan Keuangan Sementara - Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	98,69%

<p><b>5. Program Perencanaan Perangkat Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>- Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Rencana Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>- Tersusunnya Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah</li> </ul>	100%	80%
<p><b>6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencetakan, Pendistribusian, dan Pengendalian Objek dan Subjek Pajak</li> <li>- Penagihan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Pencetakan, Pendistribusian, dan Pengendalian Objek dan Subjek Pajak</li> <li>- Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah</li> </ul>	100%	71,27%
<p><b>7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah Tentang APBD</li> <li>- Penyusunan Rancangan Peraturan KHD Tentang Penjabaran APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah Tentang APBD</li> <li>- Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KHD Tentang Penjabaran APBD</li> </ul>	100%	97,89%
<p><b>8. Program Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah</li> <li>- Pengembangan Sistem Layanan E-Money A Save One Day Service Key (E-MAS ODSK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya penyusunan sistem informasi keuangan daerah</li> <li>- Terlaksananya pengembangan sistem layanan E-Money A Save One Day Service Key (E-MAS ODSK)</li> </ul>	100%	97,41%
<p><b>9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Standar Satuan Harga</li> <li>- Penyusunan RKBMD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya penyusunan standar satuan harga</li> <li>- Tersusunnya penyusunan RKBMD</li> </ul>	100%	71,98%

#### 4.1.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon berhasil menyusun dan membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tomohon tahun 2019 yang merupakan wujud pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel, taat pada asas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam hal pengelolaan Keuangan Daerah.

Atas hasil kerja keras dari semua pihak, seluruh Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam hal pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel maka Pemerintah Kota Tomohon berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 7 (tujuh) kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon tahun 2019, tertanggal 11 Mei 2020. Disadari bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan lagi merupakan sebuah prestasi melainkan adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bersama-sama dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada dan Instansi terkait, bertekad akan terus bekerja keras untuk mempertahankan opini yang diberikan oleh BPK RI.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Evaluasi LAKIP dikaitkan Dengan Fomat Penyusunan LAKIP Menurut Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh lalu dilakukan analisis untuk mengetahui Laporan Kinerja yang terdapat dalam LAKIP BPKPD apakah sudah sesuai dengan format penyusunan LAKIP yang di atur dalam PerMENPAN & RB 53 Tahun 2014 harus memuat hal-hal berikut:

- **I. PENDAHULUAN** : Pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang organisai serta uraian singkat arahan apa yang dibebankan kepada isntansi (gambaran umum dan tupoksi). Dalam LAKIP BPKPD tahun 2020 dijelaskan tentang hal-hal umum tentang instansi berupa sejarah BPKPD, visi dan misi BPKPD, dan tujuan pokok serta fungsi BPKPD. Oleh karena itu dapat disimpulkan Bab I sudah sesuai dengan format Penyusunan LAKIP menurut Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014.

- **II. PERENCANAAN KINERJA** : Pada bab ini dijelaskan ringkasan mengenai perjanjian kinerja dan perencanaan anggaran pada tahun yang bersangkutan.

- Perjanjian Kinerja, uraian singkat tentang perjanjian kinerja BPKPD yaitu, tujuan, sasaran, dan target kinerja serta program yang disusun dalam instansi.

- Perencanaan Anggaran, disajikan perencanaan anggaran untuk mencapai sasaran sesuai dengan program-program yang diatur pada tahun tersebut.

Oleh karena itu dapat disimpulkan Bab II sudah sesuai dengan format penyusunan LAKIP menurut Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014.

- **III AKUNTABILITAS KINERJA** : Pada bab ini dijelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisi capaian kinerja, serta didalamnya di uraikan secara terstruktur sasaran, penyebab keberhasilan, hambatan dan solusi, serta penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian kienrja yang maksimal dan program kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Dalam LAKIP BPKPD tahun 2020 menyajikan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2020 sejumlah Rp.54.163.740.488 dan yang terealisasi sejumlah Rp40.455.490.838,00. Oleh

karena itu dapat disimpulkan Bab III sudah sesuai dengan format penyusunan LAKIP menurut Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014.

- **IV PENUTUP** : Pada bab ini diuraikan secara umum keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan BPKPD untuk meningkatkan kerjanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan Bab III sudah sesuai dengan format penyusunan LAKIP menurut Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014.

#### 4.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja BPKPD 2020

Dalam penelitian ini untuk menilai capaian evaluasi kinerja Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon 2020 menggunakan metode STRUGES, di mana dibutuhkan program kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon 2020. Berdasarkan data tersebut berikut angka indeks pencapaian kinerja di BPKPD berdasarkan LAKIP BPKPD tahun 2020.

##### Angka Indeks Pencapaian Program Kinerja di BPKPD

Angka indeks pencapaian program kinerja di BPKPD diperoleh dari dokumen LAKIP BPKPD, nilai indeks tertinggi 100% dan terendah adalah 2,99%

##### Kelas Capaian Program Kinerja

Berdasarkan matriks penilaian kemudian disusun kelas yang mengklasifikasikan indeks ke dalam beberapa kategori sehingga terbentuk pemeringkatan pada capaian program kinerja. Dengan menggunakan pendekatan STRUGESS dapat ditentukan jumlah kelas sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Sigma K &= 1 + 3,3 \log n \\ \Sigma K &= 1 + 3,3 \log 9 \\ &= 1 + 3,3 (0,9542) \\ &= 5 \end{aligned}$$

Setelah jumlah kelas didapatkan kemudian dicari *range* atau rentang data dan yang ada. *Range* ini kemudian dibagi dengan jumlah kelas untuk memperoleh kelas interval.

Perhitungan interval kelas adalah *Range* atau rentang data dibagi jumlah kelas.

Berdasarkan perhitungan diperoleh interval atau lebar kelas sebesar 4.

$$\text{Interval/lebar kelas} = \frac{\text{Range atau rentang data}}{\text{Jumlah kelas}}$$

$$\text{Interval/lebar kelas} = \frac{100-71}{5} = 5,8$$

Maka  $i = 6$

Kemudian selanjutnya menyusun tabel distribusi frekuensi kelas pencapaian dan mengklasifikasikan tiap-tiap kelas kedalam kriteria penilaian. Dari data indeks pencapaian program kinerja BPKPD yang digambarkan diketahui bahwa nilai terendah adalah 71 maka dibuat tabel frekuensi data mulai dari 71.

Penyusunan kelas disusun dengan menentukan kelas paling bawah yaitu kelas dengan angka indeks paling rendah. Menentukan lebar masing-masing kelas dan mengkategorikan kelas kedalam kriteria penelitian tertentu berdasarkan angka indeks yang diperoleh. Kriteria penilaian yang dipakai pada 5 kelas yaitu buruk, sangat kurang baik, kurang baik, baik, dan sangat baik.

Dalam pendekatan STRUGESS untuk membuat tabel distribusi frekuensi dimulai dengan menjumlahkan batas bawah masing-masing kelas dengan intervalnya, dimulai dari kelas terendah samapai dengan kelas tertinggi.

**Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Data Indeks Pencapaian Program Kinerja BPKPD**

Kelas Interval	Kriteria	Jumlah Program Kinerja BPKPD
----------------	----------	------------------------------

71-76	Buruk	3
77-83	Sangat Kurang Baik	1
84-89	Kurang Baik	0
90-95	Baik	1
96-100	Sangat Baik	4
Total		9

Sumber : Data Hasil Olahan

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kelas yang memiliki frekuensi atau jumlah paling banyak terdapat di kelas sangat baik yang memiliki interval kelas 83%-100% dengan jumlah 5 program kinerja yang berada di kelas sangat baik.

**Tabel 4.3 Tabel Klasifikasi Tingkat Pencapaian Program Kinerja di BPKPD**

Kelas	Kriteria		Progran Kinerja BPKPD	Indeks
Sangat baik	96% - 100%	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98,69%
		2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	97,89%
		3	Program Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	97,41%
		4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,10%
Baik	90% - 95%	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,22%
Kurang Baik	84% - 89%	-	-	-
Sangat Kurang Baik	77% - 83%	-	Program Perencanaan Perangkat Daerah	80%
Buruk	71% - 76%	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang	71,98%
		2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	71,27%
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	71%

Sumber: Data Hasil Olahan

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Istansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah sesuai dengan format penyusunan LAKIP berdasarkan peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014;

2. Jika dilihat dari Laporan Kinerja Pencapaian kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dapat dikategorikan pada kelas/kriteria sangat baik. Maka dari itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tomohon dapat dipakai untuk pengembalian keputusan atau dapat dipelajari dalam jangka ke depan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan di atas, adapun saran yang diberikan penulis yaitu diharapkan dalam setiap kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan dan setiap program yang tidak optimal dapat menjadi bahan evaluasi di tahun-tahun anggaran yang akan datang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Rosita dan Ihsan (2015) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan Good Governance pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Padang*.
- Badruzaman dan Chairunnisa (2011) Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi*.
- Buchanan dan Pilgrim (2013) *Transparency and Accountability in Government Decision Making: Devolved service Delivery*.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta.
- Christensen dan Laegrid (2013), *Performance accountability and theoretical assessment*.
- Edy, Sutrisno, (2016), Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kartikahadi, Hans, dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Jakarta: IAI.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2000) Akuntabilitas dan *Good Governance*. Jakarta: LAN dan BPKP.
- Ratmono, Dwi, & Sholihin, Mahfud. (2015). "Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akual". Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yoyakarta.
- Nofianti, L dan Suseno. N. S (2014) *Factors affecting implementation of good government governance and their implications toward performance accountability. Procedia – Social and Behavioral Sciences*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Indeks.
- Santoso, S (2013) Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*.
- Sofyani, H dan Akbar, R (2013) Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Surwajeni. V. M (2015) Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.